

**PARTISIPASI MASYARAKAT DESA SEBASANG DALAM  
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2024*****Sebasang Village Community Participation in The Implementation of Village  
Development in 2024*****Kesi Jusmita<sup>1</sup>, Aldi Apriansyah<sup>2</sup>****<sup>1,2</sup>Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia****Email: kesijumita2@gmail.com*****Abstract***

*This study aims to analyze the forms of community participation in Sebasang Village in implementing village development and the factors influencing it. The study employed a qualitative descriptive method with a case study approach. Data collection was conducted through observation, interviews, and documentation of informants directly related to the research focus. The results indicate that community participation in village development has been implemented at the planning, implementation, utilization, and evaluation stages, but the level of participation is not yet optimal. Participation is still dominated by certain groups with relatively low levels of community presence and active participation. Community participation is influenced by internal factors, such as education level, employment, and community awareness, as well as external factors including information transparency, accountability, responsiveness, consensus, equality, effectiveness, and efficiency of village development implementation. Therefore, an active role is needed by the village government in realizing transparent, accountable, and participatory development governance to increase community participation and support sustainable village development.*

**Keywords:** *Community Participation, Village Development, Good Governance, Village Governance, Sebasang Village.*

***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk partisipasi masyarakat Desa Sebasang dalam pelaksanaan pembangunan desa serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap informan yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa telah terlaksana pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi pembangunan, namun tingkat partisipasi tersebut belum optimal. Partisipasi masih didominasi oleh kelompok tertentu dengan tingkat kehadiran dan keaktifan masyarakat yang relatif rendah. Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh faktor internal, seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, dan kesadaran masyarakat, serta faktor eksternal yang meliputi keterbukaan informasi, akuntabilitas, responsivitas, konsensus, kesetaraan, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan desa. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif guna meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.*

**Kata Kunci:** *Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Desa, Pemerintahan Desa, Desa Sebasang*

## PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan bagian penting dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah desa, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Partisipasi masyarakat diperlukan agar pembangunan sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan kondisi desa. Keterlibatan warga dapat dilakukan melalui musyawarah, gotong royong, serta dukungan dalam pelaksanaan program desa..

Perencanaan pembangunan desa dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang menjadi wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Melalui Musrenbang, pemerintah desa dan masyarakat menyusun prioritas pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan penting agar kebijakan pembangunan lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan warga.

Desa Sebasang di Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, telah melaksanakan perencanaan pembangunan desa melalui partisipasi masyarakat. Namun, tingkat kehadiran dan keterlibatan warga dalam musyawarah desa masih rendah. Data tahun 2024–2025 menunjukkan jumlah masyarakat yang hadir belum mencapai target undangan. Selain itu, partisipasi dalam memberikan saran dan pengambilan keputusan juga masih minim.

Rendahnya partisipasi masyarakat menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan desa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat Desa Sebasang dalam pembangunan desa tahun 2024 serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan. Untuk data partisipasi dapat dilihat dari data partisipasi masyarakat desa sebasang sebagai berikut:

**Tabel 1. Data Partisipasi**

NO	Tahun	Jumlah partisipasi
1	2024	40 orang
2	2025	33 orang

Sumber: *Kantor Desa Sebasang, rekapitulasi partisipasi masyarakat dalam RKPDes tahun 2024 dan 2025*

Dalam hal tersebut dilihat dari data diatas ini tentu merupakan sebuah masalah yang menjadi penghambat proses pelaksanaan pembangunan, karena partisipasi masyarakat Desa Sebasang sangat diharapkan agar pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan masyarakat itu sendiri. Desa sebasang merupakan salah satu desa yang telah mencoba menerapkan proses partisipasi masyarakat dalam perumusan RKPDES , namun perumusan RKPDES Desa Sebasang selama ini kurang maksimal dijalankan karena kurangnya tingkat partisipasi masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kehadiran dan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan rapat Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan desa. Selain tingkat kehadiran masyarakat yang kurang, keaktifan dalam mengajukan usul dan saran serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan juga sangat sedikit di saat pelaksanaan musyawarah.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Lokasi penelitian berada di Desa sebasang, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa. Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi merupakan pengamatan secara langsung berkaitan dengan proses dan dinamika pembangunan Desa. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide penelitian ini penulis melakukan wawancara terstruktur terhadap narasumber. Teknik dokumentasi digunakan untuk menghimpun data yang kemudian dianalisis. Dokumentasi yang dimanfaatkan dalam kajian ini meliputi Dokumen RPJMDES, Dokumen RKPDES, Data kehadiran masyarakat dalam kegiatan gotong royong atau rapat pembangunan dan Dokumentasi kegiatan pembangunan yang melibatkan masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Partisipasi Masyarakat Desa Sebasang Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2024**

Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam pelaksanaan pembangunan desa karena masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga terlibat langsung dalam setiap tahapan pembangunan. Di Desa Sebasang, partisipasi masyarakat terlihat melalui keterlibatan dalam musyawarah desa, kegiatan gotong royong, serta dukungan terhadap program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa. Masyarakat juga berperan dalam memberikan saran, usulan, dan masukan terkait pembangunan infrastruktur, kegiatan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, bentuk partisipasi masyarakat meliputi partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan hasil pembangunan, dan evaluasi pembangunan desa.

### **Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan**

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan di Desa Sebasang dilakukan melalui musyawarah desa dan MusrenbangDes dengan melibatkan unsur perwakilan seperti BPD, RT, RW, kepala dusun, lembaga masyarakat, dan Karang Taruna. Masyarakat berperan dalam menyampaikan usulan, kritik, dan aspirasi yang menjadi bahan pertimbangan pemerintah desa dalam menetapkan program pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, proses musyawarah telah berjalan sesuai prosedur dengan tingkat kehadiran yang memenuhi syarat. Namun, partisipasi masyarakat masih bersifat representatif dan belum melibatkan seluruh lapisan masyarakat secara merata. Meski demikian, mekanisme musyawarah menunjukkan penerapan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel dalam perencanaan pembangunan desa.



**Gambar 1. Foto Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Partisipasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan**

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Sebasang dilakukan melalui keterlibatan langsung dalam pembangunan fisik dan nonfisik, seperti gotong royong, kerja bakti, pembangunan drainase, paving gang, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator yang mengoordinasikan kegiatan, menyediakan anggaran, dan mendorong partisipasi warga. Berdasarkan hasil wawancara, kontribusi masyarakat lebih dominan dalam bentuk tenaga kerja di lapangan. Namun, keterlibatan masyarakat belum merata karena sebagian warga masih menganggap pembangunan sebagai tanggung jawab pemerintah desa. Data pembangunan fisik menunjukkan adanya perencanaan yang terstruktur sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan pembangunan desa.



**Gambar 2. Pembangunan Paving Gang Desa Sebasang Kecamatan Moyo Hulu Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan**

Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan di Desa Sebasang terlihat melalui penggunaan, pemeliharaan, dan pengawasan fasilitas desa yang telah dibangun. Masyarakat mulai menunjukkan rasa tanggung jawab dan memiliki terhadap sarana prasarana desa dengan memanfaatkan fasilitas untuk kepentingan bersama, seperti mendukung mobilitas dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan panggung seni untuk kegiatan budaya dan peringatan hari besar, yang dirawat melalui pembersihan dan gotong royong. Namun, partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan belum optimal karena pembangunan dinilai belum merata dan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga tingkat kepuasan dan keterlibatan dalam pemeliharaan masih perlu ditingkatkan.

## Evaluasi

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan Desa Sebasang dilakukan melalui penyampaian kritik, saran, dan masukan terhadap hasil pembangunan desa. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh program pembangunan fisik Tahun Anggaran 2024 telah terealisasi sesuai RKPDes dan MusrenbangDes. Namun, partisipasi masyarakat dalam evaluasi masih bersifat pasif karena belum tersedia forum evaluasi resmi. Masukan masyarakat umumnya disampaikan melalui perwakilan BPD atau kunjungan langsung ke kantor desa. Rendahnya sosialisasi serta kekhawatiran bahwa masukan tidak ditindaklanjuti turut memengaruhi keterlibatan masyarakat. Evaluasi pembangunan dilakukan secara terintegrasi dalam penyusunan RKPDes sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan perencanaan pembangunan desa.

## **Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Desa Sebasang Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2024**

Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan desa yang efektif, demokratis, dan berkelanjutan. Di Desa Sebasang, keterlibatan masyarakat tidak hanya terbatas pada pelaksanaan pembangunan fisik, tetapi juga mencakup perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pembangunan. Partisipasi tersebut mencerminkan kesadaran masyarakat dalam mendukung kemajuan desa melalui kerja sama antara pemerintah desa dan warga.

Analisis faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat meliputi aspek keterbukaan, akuntabilitas, responsivitas, konsensus, kesetaraan, efektivitas, dan efisiensi. Pembahasan didasarkan pada hasil wawancara dengan pemerintah desa, BPD, tokoh pemuda, dan masyarakat. Temuan ini memberikan gambaran mengenai kondisi partisipasi masyarakat di Desa Sebasang, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan yang memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat Desa Sebasang dalam pembangunan dipengaruhi oleh keterlibatan warga melalui musyawarah desa dan kegiatan gotong royong. Masyarakat berkontribusi dalam bentuk tenaga, materi, serta penyampaian aspirasi pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pemerintah desa membuka ruang partisipasi melalui forum musyawarah untuk menampung usulan masyarakat. Nilai gotong royong menjadi faktor utama yang mendukung keberhasilan pembangunan desa.

Namun, partisipasi masyarakat belum merata, terutama pada kalangan pemuda yang masih terkendala kesibukan dan rendahnya kesadaran untuk terlibat aktif. Selain itu, keterbatasan anggaran desa memengaruhi realisasi beberapa program pembangunan, sehingga diperlukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi sumber daya desa.

**Tabel 2. Anggaran Program Dan Sumber anggarannya**

No	Uraian Pendapatan	Jumlah (Rp)
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.531.768.500</b>
<b>4.1</b>	<b>Pos Pendapatan Asli Desa</b>	<b>3.500.000</b>
4.1.1	Hasil Usaha Desa	3.500.000
4.1.2	Hasil Aset Desa	2.000.000
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	0
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.526.268.500</b>
4.2.1	Dana Desa (DD)	735.683.000
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPRD)	40.195.900
4.2.3	Alokasi Dana Desa (ADD)	455.389.600
4.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	295.000.000
<b>4.3</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>0</b>
4.3.5	Koreksi Kesalahan belanja tahun sebelumnya	0
4.3.6	Bunga Bank	0
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.531.768.500</b>

Keterbukaan pemerintah Desa Sebasang dalam pembangunan desa diwujudkan melalui penyampaian informasi dan pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa. Pemerintah desa memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui rencana, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan, serta menyampaikan aspirasi dan masukan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa keterbukaan informasi telah berjalan cukup baik melalui forum Musrenbangdes dan sosialisasi lanjutan oleh RT/RW maupun papan informasi desa. Transparansi juga terlihat pada penyajian data kegiatan dan anggaran pembangunan yang dapat diketahui masyarakat. Kondisi ini mendorong partisipasi masyarakat serta meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan desa secara lebih akuntabel dan transparan.

**Tabel 2. Kegiatan Dan Anggaran Program Pembangunan Desa**

No	Kegiatan	Anggaran
1	Lanjutan Pembangunan Drainase Dusun A, B dan <u>Ketanga</u>	150.000.000
2	Pembangunan Sarana Olah Raga (Lapangan <u>Volley</u> dan Takraw)	70.000.000
3	Pemasangan Ornamen Lampu sebagai penerang Jalan Umum	6.250.000
4	Rehabilitasi jalan Lingkungan	50.000.000
5	Pembangunan <u>Deker</u>	18.000.000
6	Pembangunan <u>Mushollah</u> Dusun <u>Ketanga</u>	20.000.000

Akuntabilitas pembangunan di Desa Sebasang diwujudkan melalui pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat atas proses dan hasil pembangunan. Transparansi dilakukan dengan menyampaikan informasi melalui musyawarah desa, papan informasi, dan komunikasi langsung kepada masyarakat. Pemerintah desa memberikan penjelasan mengenai rencana kegiatan, sumber anggaran, sasaran program, serta laporan realisasi pembangunan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Hasil wawancara menunjukkan bahwa keterbukaan informasi ini memungkinkan masyarakat mengetahui dan mengawasi pelaksanaan

pembangunan desa. Upaya tersebut mencerminkan komitmen pemerintah desa dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendorong pengawasan terhadap penggunaan dana dan pelaksanaan program pembangunan.

Responsivitas pemerintah Desa Sebasang terlihat melalui upaya menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa. Aspirasi yang disampaikan melalui musyawarah desa dan komunikasi langsung dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan. Pemerintah desa berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan masyarakat, terutama pada sektor infrastruktur yang tercantum dalam RPJMDes. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian masyarakat menilai respons pemerintah masih lambat dan tidak semua usulan ditindaklanjuti secara merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa responsivitas pemerintah desa sudah berjalan, tetapi masih perlu ditingkatkan agar lebih cepat, merata, dan mampu mengakomodasi seluruh aspirasi masyarakat secara optimal.

Konsensus dalam pembangunan Desa Sebasang diwujudkan melalui musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga. Forum ini menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, dan usulan sehingga keputusan pembangunan dapat disepakati bersama. Hasil wawancara menunjukkan bahwa konsensus tidak hanya berupa persetujuan terhadap program, tetapi juga memastikan aspirasi masyarakat diperhitungkan dalam setiap tahap pembangunan. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam dokumen RPJMDes dan RKPDes sebagai dasar perencanaan pembangunan. Praktik konsensus ini menunjukkan adanya partisipasi masyarakat yang cukup baik, sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan dan mendukung pelaksanaan pembangunan desa secara partisipatif dan terarah.

Kesetaraan dalam pembangunan Desa Sebasang diwujudkan melalui pemberian kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk terlibat dalam musyawarah desa, menyampaikan aspirasi, serta memberikan saran dan kritik terkait pembangunan. Pemerintah desa berupaya membuka ruang partisipasi bagi berbagai unsur masyarakat, termasuk BPD, lembaga kemasyarakatan, dan warga desa. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa partisipasi belum sepenuhnya merata karena aspirasi masyarakat umum sering kurang diperhatikan dibandingkan pendapat RT, RW, atau Kepala Dusun. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam partisipasi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang lebih inklusif agar seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam pengambilan keputusan pembangunan desa.

Efektivitas dan efisiensi pembangunan di Desa Sebasang terlihat dari pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa dan pelaksanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa menyesuaikan program dengan RKPDes dan ketersediaan anggaran agar penggunaan waktu, tenaga, dan biaya lebih optimal. Partisipasi masyarakat melalui gotong royong membantu mengurangi beban biaya pembangunan serta meningkatkan ketepatan sasaran program. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pembangunan telah memberikan manfaat, terutama pada infrastruktur jalan. Namun, manfaat pembangunan belum dirasakan merata di seluruh wilayah desa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan perencanaan dan distribusi sumber daya agar pembangunan lebih efektif, efisien, dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Sebasang dalam pelaksanaan pembangunan desa tahun 2024 telah berlangsung pada tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi pembangunan. Keterlibatan masyarakat terlihat melalui musyawarah desa, gotong royong, serta penyampaian aspirasi terkait program pembangunan. Namun, tingkat partisipasi masyarakat masih belum optimal karena kehadiran dan keterlibatan aktif warga cenderung didominasi oleh kelompok tertentu. Faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat meliputi keterbukaan informasi, akuntabilitas, responsivitas pemerintah desa, konsensus, kesetaraan, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan pembangunan. Pemerintah desa telah berupaya menciptakan tata kelola pembangunan yang partisipatif melalui musyawarah dan transparansi informasi, tetapi masih terdapat kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan anggaran, serta belum meratanya partisipasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pemerintah desa dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat agar pembangunan desa berjalan lebih inklusif, efektif, dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, M. (2018). *Studi deskriptif peran perempuan dalam perencanaan pembangunan partisipatif di Kota Mataram*.
- Beratha, I.N. (1982). *Pembangunan dan Perubahan Sosial Budaya*. Denpasar: Universitas Udayana Press.
- Bihanding, H. (2019). *Perencanaan Pembangunan Partisipatif desa*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Burhanuddin. (2022). *Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui implementasi program alokasi dana desa*.
- Cristian, Y. (2015). Implementasi Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4 (1), 45-53.
- Dewi, R. (2013). Masalah Sosial Ekonomi dan Politik dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Sosiohumaniora*, 15 (2), 99-108.
- Dokumen RKPDES Desa Sebasang Tahun 2024-2025. (Sumber: Kantor Desa Sebasang).
- Ginting, R. (2000). Pembangunan Partisipatif di Pedesaan Indonesia. *Jurnal Pembangunan Sosial Ekonomi*, 2 (1), 34-42.
- Handoko, B. (2019). Proses Penyusunan RPJMDes dan RKPDes di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 7 (2), 145-156.
- Herawati, S. (2021). *Dinamika dan Peran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Husnul Imtihan. (2017). *Peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat 2016)*.
- Hutagalung, S.S., (2022). *Buku Ajar Partisipasi Dan Pemberdayaan Di Sektor Publik*. Malang: CV literasi Nusantra Abadi.
- Imran, A. (2023). *Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Desa Balai Batu Sandaran Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto*.
- Lestari, S. M. (2021). *Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) di Desa Pasi Pinang*.

- Maulana, M. R. (2022). *Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan RKP Desa (Studi Kasus Desa Bayeun Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur)*.
- Melis, I. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 120-130.
- Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1992). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Beverly Hills: SAGE Publications.
- Nurifa, I.S. (2025). *Analisis Partisipasi Masyarakat Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pembangunan Desa Labuhan Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pembangunan Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang *Prinsip-Prinsip Kepemerintahan yang Baik*.
- Permendesa Nomor 21 Tahun 2020 tentang *Pedoman Umum Pembangunan Desa*.
- Probosiwi, R. (2015). Peran Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 3 (1), 1-9.
- Rasidi, M. (2011). Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 3 (1), 55-64.
- Sahir, S.H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.
- Salusu, J. (1998). *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Nonprofit*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Samsu, R. (2019). *Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa*.
- Sinaga, D. (2023). *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif)*. Jakarta: UKI press.
- Suryono, A. (2001). *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Suwandi, S. (2015). Peran Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Pemberdayaan Desa*, 2 (1), 33-40.
- Tahulending, A., Kaunang, J., & Sumampouw, M. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6 (1), 77-86.
- Tamo, D.J. (2016). Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai Instrumen Pembangunan Partisipatif. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, 4 (3), 112-122.
- Tampobolon, M., Simanjuntak, N., Silalahi, F. (2023). *Birokrasi & Good Governance*. Padang Sumatera Barat: Global Eksekutif Teknologi.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.
- Wijaksono, A. (2025). *Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Desa di Desa Tambarobone Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara*.
- Zainuddin. (2023). *Dampak Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) terhadap Tingkat Pembangunan di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat*.
- Zamroni, M. (2011). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Berkelanjutan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2 (3), 200-210.